

PEMANFAATAN KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IJEPA) DAN INDONESIA – PAKISTAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT* (IPPTA)

Utilization of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Indonesia - Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)

Endah Ayu Ningsih¹, Telisa Aulia Falianty², Fitri Tri Budiarti¹

¹Pusat Pengkajian Kerja sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan-RI, Jl.M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta, 10110, Indonesia

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
Email: ayuningsih.endah@gmail.com

Naskah diterima: 10/02/2018; Naskah direvisi: 26/06/2018; Disetujui diterbitkan: 11/12/2018
Dipublikasikan online: 31/12/2018

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi tingkat pemanfaatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA) dalam ekspor dan impor Indonesia ke Jepang dan Pakistan. Tingkat pemanfaatan FTA untuk ekspor menggunakan rasio nilai perdagangan yang termuat dalam Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap nilai ekspor ke negara mitra. Sedangkan tingkat pemanfaatan impor menggunakan rasio nilai impor produk yang memenuhi syarat terhadap total impor Indonesia dari negara mitra. Studi ini menemukan bahwa pemanfaatan IJEPA (2012-2016) cenderung menurun. Pada tahun 2016 tingkat pemanfaatan ekspor sebesar 47,2%. Sementara pemanfaatan IPPTA untuk ekspor ke Pakistan mengalami peningkatan yang signifikan sejak diimplementasi tahun 2013 dengan tingkat pemanfaatan ekspor sebesar 72,0% pada tahun 2016. Di sisi impor pemanfaatan IJEPA mencapai 67,7% sementara IPPTA hanya 18,8% (2016). Pemanfaatan impor IJEPA dan IPPTA relatif stagnan, jumlah perusahaan yang menggunakan SKA IJEPA sudah pada level jenuh, sementara pengguna SKA IPPTA masih tumbuh 18,2% per tahun. Bentuk PTA lebih memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara mitra dibandingkan FTA yang komprehensif. Kebijakan melakukan FTA dalam bentuk *Economic Partnership* perlu disertai dengan kerja sama yang menjamin peningkatan perdagangan yang seimbang antar negara anggota.

Kata Kunci: Utilisasi FTA, IJEPA, IP-PTA

Abstract

This study aims to address the utilization level of The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA). The level of FTA utilization for exports was measured by the ratio of trade value recorded in the Certificate of Origin (CoO) to Indonesia's export value to the related country. While the level of utilization of imports was defined by the ratio of the import value of eligible products to Indonesia's total imports from the related country. The study found IJEPA's utilization during 2012-2016 tended to decrease. In 2016, the level of utilization was about 47.2%. While IPPTA utilization for exports to Pakistan experienced a significant increase since it was implemented in 2013 with a rate of export utilization was 72.0% in 2016. On the import side, the level of utilization under IJEPA reached 67.7% while IPPTA was only 18.8% at the same period. In terms of the imports utilization level of both IJEPA and IPPTA, it was relatively stagnant, while the number of companies utilize IJEPA's CoO was saturated. In contrast, IPPTA's CoO users still grew at 18.2% per year. This study concluded PTA provides more positive impact on increasing Indonesia's exports to related countries than comprehensive FTAs. Thus, establishing an FTA in the form of an Economic Partnership needs to be followed with the cooperation that guarantees trade balance within the parties.

Keywords: FTA Utilization, IJEPA, IP-PTA

JEL Classification: F12, F13, F15

PENDAHULUAN

Free Trade Agreement (FTA) merupakan skema penurunan tarif di mana negara-negara anggota memiliki hak istimewa untuk memperoleh tingkat tarif kurang dari tingkat tarif *Most Favored Nation* (MFN) ketika melakukan ekspor ke mitra FTA mereka. Namun dalam prakteknya, beberapa produk yang memenuhi syarat untuk penurunan tarif di bawah skema FTA tidak benar-benar mendapatkan preferensi tarif seperti yang termuat dalam skema. Dalam pelaksanaan FTA yang sebenarnya, eksportir harus melakukan proses verifikasi untuk memperoleh tarif preferensi. Proses yang diperlukan untuk "memanfaatkan FTA" kadang-kadang membutuhkan biaya yang signifikan bagi eksportir sehingga eksportir memutuskan untuk tidak menggunakan preferensi FTA, dan dengan demikian harus membayar tingkat tarif MFN (Itaravitak et al., 2011).

Literatur tentang pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas baru-baru ini berkembang pesat (Candau et.al, 2004; Takashi & Urata, 2008; Takashi & Urata, 2009; Keck & Lendle,

2012; Athukorala & Kohpaiboon, 2011; Itaravitak et.al, 2011; Kawai & Wignaraja, 2011; Hayakawa et.al, 2013a; Kawai & Wignaraja, 2013; Hayakawa et.al, 2014; Ing et.al, 2016) karena menjadi lebih penting untuk mendorong penggunaan FTA ditengah meroketnya jumlah-jumlah FTA yang terbentuk di seluruh dunia (Hayakawa, et al., 2013a). Menurut Okabe (2015) pemanfaatan FTA di ASEAN belum optimal untuk mempromosikan perdagangan antar negara ASEAN. Okabe (2015) menemukan masih terdapat permasalahan selain tarif seperti hambatan non tarif, fasilitas perdagangan antar anggota dan koordinasi Surat Keterangan Asal (SKA).

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang, Indonesia melakukan diplomasi perdagangan melalui *multitrack strategy* di fora multilateral, regional, dan bilateral. Melalui *multitrack strategy* ini, Indonesia telah memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik multilateral, yang bertumpu pada sistem perdagangan multilateral (WTO); regional, yang terfokus pada *Association of Southeast*

Asian Nations (ASEAN) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC); dan bilateral, yang berorientasi pada peninjauan pengembangan *Comprehensive Economic Partnership* dan FTA. Saat ini Indonesia telah memiliki dua kerja sama perdagangan bilateral yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA).

Sejak implementasi IJEPA tahun 2008, Indonesia seperti berhenti melakukan FTA bilateral dengan negara mitra dagang lainnya dan lebih memilih untuk melakukan FTA di bawah skema regional ASEAN. Kerja sama bilateral yang dilakukan Indonesia setelah IJEPA yaitu IPPTA yang memiliki cakupan liberalisasi lebih sedikit. Dengan demikian, sebagai contoh kerja sama perdagangan bilateral Indonesia yang sudah ada, kedua forum FTA ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pertanyaannya adalah apakah FTA yang komprehensif seperti IJEPA akan berpeluang untuk lebih dimanfaatkan oleh para pelaku usaha atau kerja sama *Preferensial Trade Agreement* yang fokus pada produk-produk yang menjadi minat ekspor utama Indonesia yang justru dapat

dimanfaatkan secara optimal. Kajian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengevaluasi tingkat pemanfaatan kedua forum FTA ini oleh pelaku usaha baik di sisi ekspor maupun di sisi impor.

METODE

Ada beberapa pendekatan untuk menghitung tingkat pemanfaatan FTA. Beberapa metode telah diusulkan dalam berbagai penelitian Candau et al., (2004) dan Inama (2003) menggunakan rasio cakupan FTA yang didefinisikan sebagai rasio pangsa nilai perdagangan untuk produk yang memenuhi skema FTA (*eligible product*) terhadap total perdagangan. Hayakawa et al., (2013a) mengukur pemanfaatan FTA melalui pangsa jumlah perusahaan pengguna. Lebih jauh Hayakawa (2014) menghitung akumulasi diagonal utilisasi FTA dan pengaruhnya terhadap *trade creation effect* pada FTA yang dilakukan oleh Jepang dan Thailand dalam kerangka bilateral dan multilateral.

Pada prinsipnya, ada dua pendekatan utama untuk menganalisis penggunaan FTA. Yang pertama dengan menggunakan catatan SKA dan yang kedua menggunakan metode survei terhadap perusahaan eksportir dan importir (Ing, et al, 2016). Masing-

masing memiliki aspek positif dan negatif. Pendekatan yang didasarkan pada SKA memiliki dua aspek positif. Pertama, metode ini menyediakan informasi tentang penggunaan rinci FTA dengan produk. Kedua, tidak ada masalah sampel bias. Namun tantangan utamanya adalah ketersediaan data. Selain itu, data penggunaan SKA tidak memberikan informasi tentang karakteristik perusahaan. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah Ratananarumitsorn et.al (2008) dan Athukorala & Kohpaiboon (2011).

Metode kedua untuk mengukur pemanfaatan FTA adalah dengan pendekatan survei seperti yang dilakukan oleh Takashi & Urata (2008), Wignaraja et.al (2009), Zhang (2010), Itaravitak (2011), Keck & Lendle (2012) dan Cheong (2014). Dua aspek positif utama dari pendekatan ini adalah, pertama, bahwa pendekatan ini menyediakan karakteristik perusahaan, yang memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana karakteristik perusahaan akan memengaruhi keputusan perusahaan untuk menggunakan FTA. Kedua, memungkinkan kita untuk mengamati motivasi untuk penggunaan FTA serta kendala pada penggunaannya.

Tantangan utama dari pendekatan survei adalah dari segi biaya dan waktu penelitian. Selain itu, ada masalah bias sampel dimana kualitas penelitian sangat bergantung pada strategi survei.

Untuk menghitung tingkat pemanfaatan IJEPA dan IPPTA penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada data penerbitan SKA sebagai ukuran pemanfaatan di sisi ekspor dengan mengikuti metode yang diusulkan oleh Ratananarumitsorn et.al (2008). Sementara untuk menghitung pemanfaatan di sisi impor menggunakan pendekatan *eligible product* dalam Inama (2003) dan Hayakawa et.al (2013a).

Untuk menghitung pemanfaatan FTA dari sisi ekspor digunakan data pemanfaatan SKA. Ratananarumitsorn et al., (2008), pemanfaatan FTA dengan menggunakan SKA didefinisikan sebagai rasio nilai ekspor yang dinyatakan dalam sertifikat SKA oleh eksportir untuk produk yang memperoleh preferensi tarif terhadap total ekspor semua produk yang layak memperoleh preferensi tarif. Pembilang, atau dalam hal ini adalah "nilai ekspor yang dinyatakan dalam sertifikat SKA" dapat diperoleh dari agregat nilai yang

tertera pada setiap SKA yang diajukan. Sementara itu, penyebut, atau "nilai ekspor produk yang layak memperoleh

preferensi tarif" diperoleh dari data BPS. Dengan demikian, pemanfaatan FTA dari sisi ekspor dinyatakan dengan:

$$\text{Utilisasi Ekspor} = \frac{\text{Nilai Ekspor yang Dinyatakan dalam SKA}}{\text{Total Ekspor Indonesia ke Negara Mitra}} \dots\dots\dots(1)$$

Kekurangan dari pendekatan ini adalah bahwa SKA di sisi eksportir kemungkinan akan gagal menerima tarif preferensi impor di negara mitra FTA. Dengan demikian angka tingkat pemanfaatan di sisi ekspor dengan pendekatan ini akan *overestimate* dari pemanfaatan yang terjadi di lapangan (Ratananarumitsorn et.al, 2008). Hayakawa et, al (2013b) menjelaskan bahwa selisih antara nilai yang tertera dalam SKA dengan realisasi ekspor berbanding positif terhadap tingkat volatilitas produk ekspor dan banyaknya pos tarif yang terdapat dalam kode *Harmonized System* (HS) 6 digit yang sama.

Selain menghitung pemanfaatan FTA dalam nilai ekspor, penelitian ini juga menganalisis perkembangan jumlah perusahaan yang memanfaatkan

preferensi FTA untuk ekspor mereka. Analisis ini memanfaatkan pendekatan statistik dari penerbitan SKA per perusahaan. Selanjutnya untuk menghitung pemanfaatan dari sisi impor, penelitian ini mengikuti apa yang disarankan oleh Inama (2003) dan Hayakawa et.al (2013a) di mana pemanfaatan FTA dihitung dengan rasio total nilai produk impor yang *eligible* terhadap total nilai impor. Definisi dari *eligible product* adalah produk yang memperoleh preferensi dan tingkat tarif preferensi lebih rendah dari tarif MFN. Untuk beberapa kasus, karena adanya penurunan tarif MFN secara *unilateral* memungkinkan tarif MFN menjadi lebih rendah dari tarif preferensi. Berdasarkan definisi tersebut, pemanfaatan FTA dari sisi impor dinyatakan dengan:

$$\text{Utilisasi Impor} = \frac{\text{Total Impor Produk Eligible}}{\text{Total Impor Indonesia dari Negara Mitra}} \dots\dots\dots(2)$$

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data realisasi penerbitan SKA IPPTA dan IJEPA per produk dan per perusahaan untuk tahun 2012-2016 yang bersumber dari Direktorat Fasilitasi, Kementerian Perdagangan. Data perdagangan ekspor dan impor diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

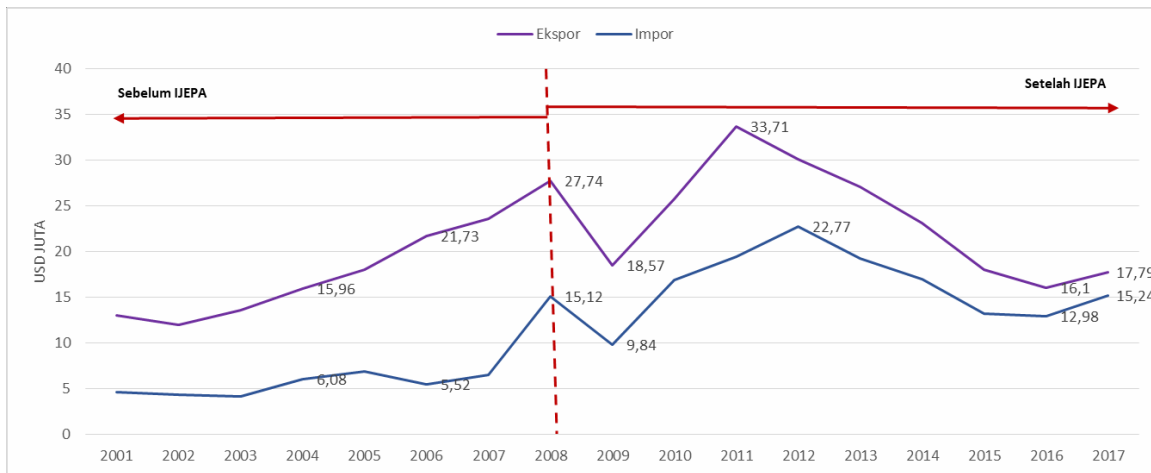
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Perkembangan Perdagangan Indonesia-Jepang

IJEPA mulai berlaku pada 1 juli 2008 melalui *joint statement* Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Perdagangan Indonesia yang dilakukan di Tokyo, Jepang. Tujuan dari pembentukan IJEPA diantaranya untuk mendorong kelancaran perdagangan barang dan jasa serta meningkatkan arus investasi dan *natural person* antara kedua negara. IJEPA juga meliputi kerja sama peningkatan kapasitas dalam area kerja sama yang saling menguntungkan seperti industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan kelautan (*Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018*).

Berdasarkan komitmen yang tertuang dalam kesepakatan IJEPA, Indonesia akan menurunkan tarif untuk 11.171 pos tarif atau 93% dari total pos

tarif Indonesia (berdasarkan klasifikasi dalam Buku Tarif dan Bea Masuk Indonesia / BTBMI 2004) yang mewakili 93% nilai impor Indonesia dari Jepang pada tahun 2006. Sementara Jepang memberikan penurunan tarif untuk 9.275 pos tarif atau sekitar 90% dari total pos tarif Jepang yang mencakup 99% ekspor Indonesia ke Jepang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada awal implementasi IJEPA, nilai ekspor Indonesia ke Jepang mengalami peningkatan dari USD 27,7 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 33,7 miliar pada tahun 2011. Namun pada tahun-tahun selanjutnya ekspor Indonesia terus turun hingga menjadi USD 17,8 miliar pada tahun 2017. Impor Indonesia dari Jepang juga mengalami pola yang sama di mana peningkatan terjadi pada tahap awal implementasi dari USD 15,12 miliar pada tahun 2008 dan meningkat paling tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar USD 22,77 miliar kemudian secara bertahap turun menjadi USD 15,24 miliar pada tahun 2017. Selama periode tersebut neraca perdagangan Indonesia masih surplus terhadap Jepang walaupun terus menurun tiap tahunnya, terutama ekspor migas ke Jepang yang penurunannya sangat drastis.



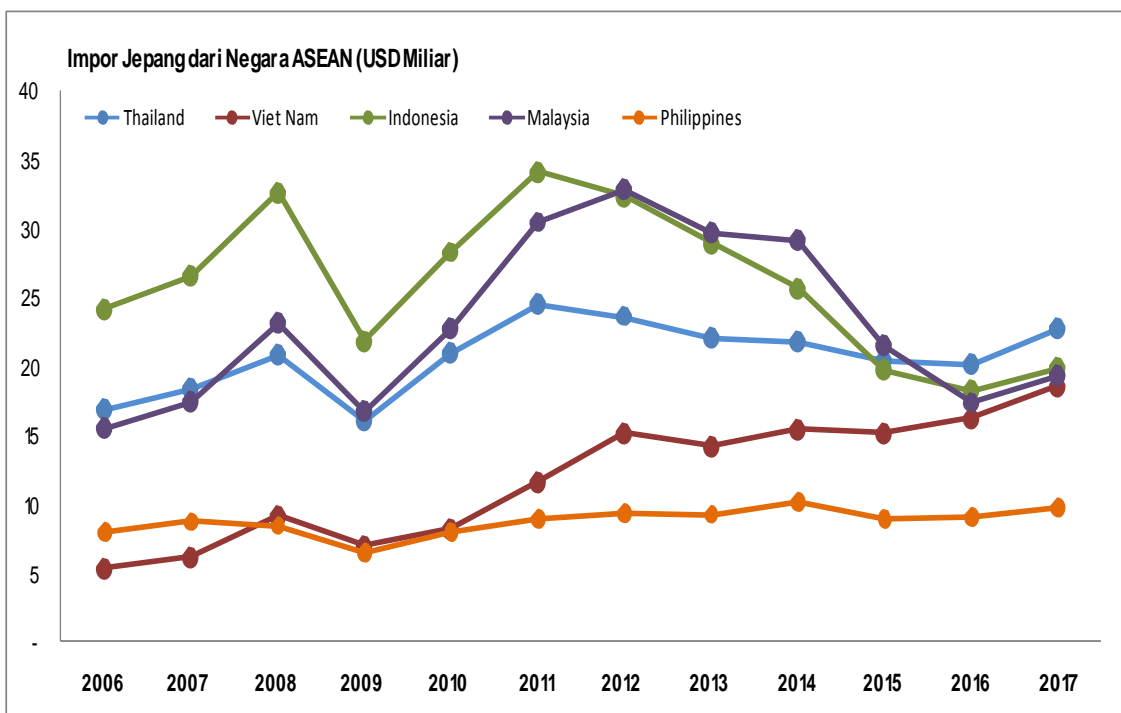
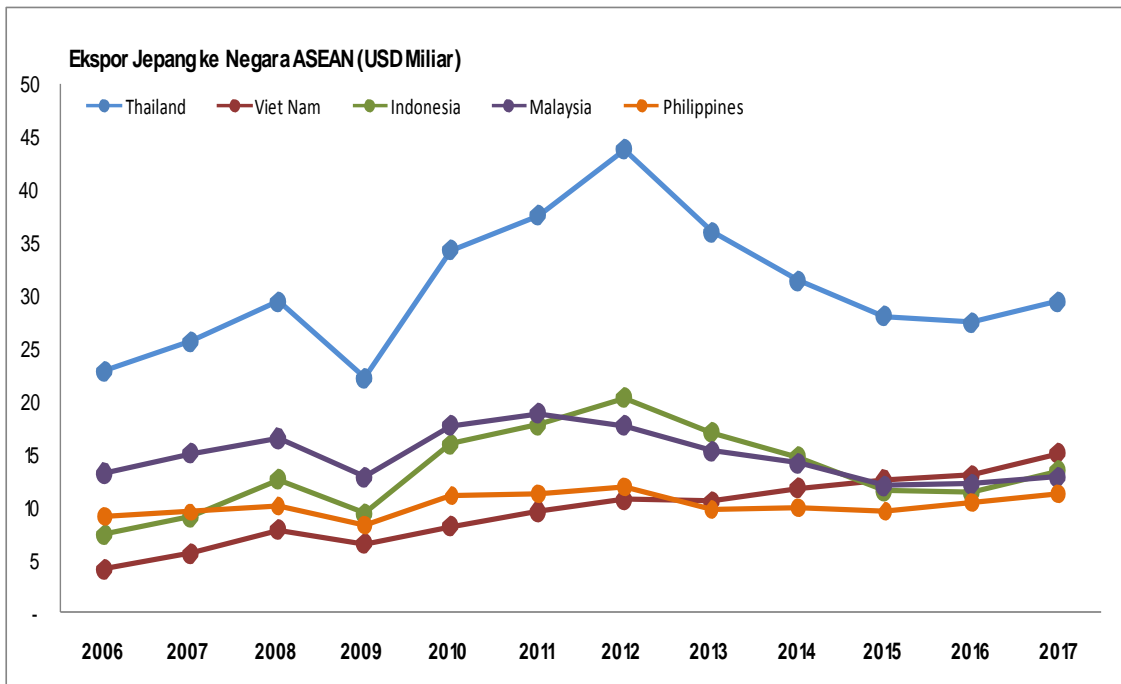
Gambar 1. Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang, 2001-2017 (USD Juta)

Sumber: Trademap, (2018) diolah

Jika dicermati lebih lanjut kinerja perdagangan Jepang dengan Indonesia mencerminkan kinerja perdagangan Jepang secara umum. Gambar 2 menunjukkan bahwa ekspor Jepang ke negara ASEAN menurun pada tahun 2009 dan meningkat dengan puncak tertinggi pada tahun 2012 kemudian turun kembali hingga tahun 2017. Naik-turunnya ekspor Jepang juga dipengaruhi oleh kondisi perdagangan dunia pada saat yang sama (Ando & Kimura, 2012).

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, nilai impor Jepang dari Indonesia lebih tinggi sejak tahun 2006 hingga tahun 2013. Malaysia mulai mengambil pangsa impor Jepang sejak 2013 dan Thailand sejak 2015. Impor Jepang dari negara-negara ASEAN

pada umumnya merupakan barang elektronik, mesin dan sukucadangnya. Ekspor Jepang ke ASEAN juga didominasi oleh produk elektronik, mesin dan perlengkapannya selain juga produk sukucadang kendaraan. Struktur perdagangan Jepang dengan negara-negara ASEAN tersebut mencerminkan bahwa negara ASEAN dipilih oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk membentuk jaringan produksi internasional di kawasan Asia Timur (Kawai, 2011). Tahakashi dan Urata (2008 dan 2009) juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang yang terkait dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara mitra FTA lebih banyak memanfaatkan tarif preferensi FTA dibanding perusahaan lainnya.



Gambar 2. Ekspor dan Impor Jepang ke Negara-Negara ASEAN

Sumber: Trademap (2018), diolah.

Kerja sama IJEPA yang sangat liberal dan komprehensif dari cakupan dan kedalaman integrasi telah menarik minat peneliti untuk mengevaluasi

implementasinya. Ardiyanti (2015), Budiarti & Hastiadi (2015) dan Gocklas & Sulasmiyati (2017) menyimpulkan bahwa IJEPA memberi keuntungan bagi

ekspor Indonesia. Ardiyanti (2015) memanfaatkan data ekspor dan impor bulanan dari tahun 1990 hingga 2014 dan menemukan bahwa IJEPA secara signifikan mampu meningkatkan kinerja ekspor non migas Indonesia ke Jepang namun tidak untuk impor non migas Indonesia dari Jepang. Budiarti & Hastiadi (2015) menyimpulkan bahwa industri pengolahan Indonesia memanfaatkan tarif preferensi IJEPA untuk impor barang modal dan bahan baku yang kemudian menurunkan biaya produksi berupa *Price Cost Margin* (PCM). Skema IJEPA telah memperluas pangsa pasar ekspor industri pengolahan Indonesia.

Gocklas & Sulasmiyati (2017) juga menyimpulkan setelah implementasi IJEPA nilai perdagangan kedua negara mengalami peningkatan signifikan dibanding sebelum implementasi. Setiawan (2012) menganalisis dampak tidak langsung IJEPA terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekspor. Setiawan (2012) menyimpulkan bahwa Indonesia menerima manfaat yang lebih besar dari Jepang dalam hal naiknya kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional secara nominal dan persentase. Setiawan (2012) juga menyimpulkan tingkat pertumbuhan

ekspor Indonesia lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor Jepang.

Perkembangan Perdagangan Indonesia – Pakistan

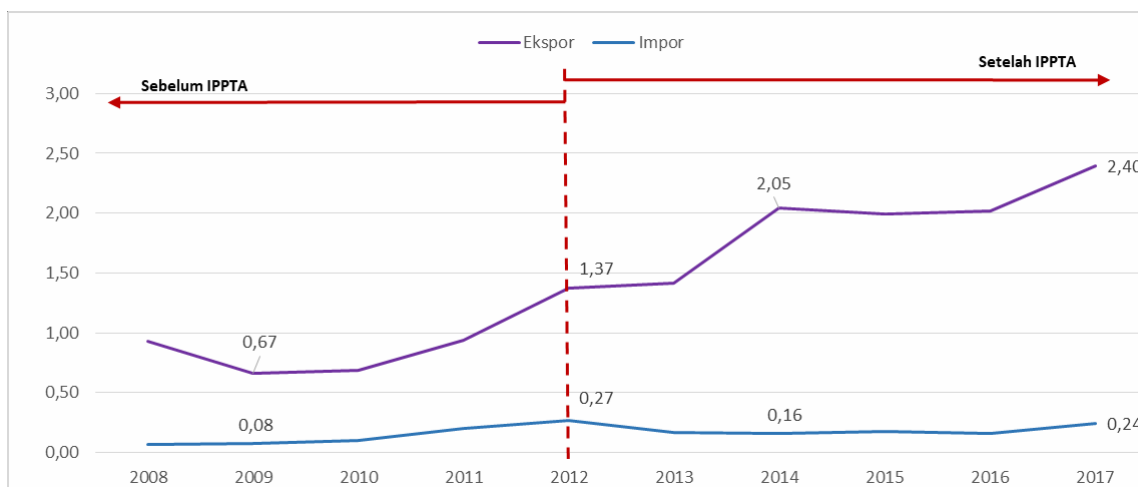
Berbeda dengan IJEPA, kerja sama Indonesia - Pakistan lebih sederhana dan hanya mencakup beberapa pos tarif yang diperdagangkan dalam bentuk IPPTA. Dalam IPPTA, disepakati bahwa Indonesia memperoleh preferensi akses pasar ke Pakistan sebanyak 313 pos tarif, sedangkan Pakistan mendapat preferensi akses pasar ke Indonesia sebanyak 232 pos tarif.

Implementasi IPPTA pada tahun 2013 mengakibatkan kenaikan ekspor Indonesia ke Pakistan sebesar 40% dari USD 1,4 miliar pada tahun 2013 menjadi USD 2 miliar pada tahun 2014. Ekspor Indonesia ke Pakistan didominasi oleh *Palm Oil* (HS 1511) dengan nilai ekspor pada tahun 2013 sebesar USD 800 ribu menjadi USD 1,3 juta pada satu tahun setelah implementasi. IPPTA ini telah menggeser dominasi Malaysia sebagai negara pemasok palm oil ke Pakistan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir total perdagangan antara Indonesia dengan Pakistan pada mengalami kenaikan rata-rata 8.97% pertahun. Ekspor Indonesia ke Pakistan

didominasi oleh produk non migas seperti *palm oil*, kelapa, briket, kendaraan dan aksesoris kendaraan, serat dan benang, kertas dan produk lainnya. Sementara itu, ekspor Pakistan ke Indonesia sebagian besar merupakan produk pertanian seperti beras, jeruk, kapas, tembakau dan ikan. Produk ekspor Pakistan ke Indonesia

lainnya adalah kertas, benang, kulit dan pakaian. Nilai ekspor Indonesia ke Pakistan tumbuh rata-rata 12% pertahun, sedangkan nilai impor meningkat rata-rata 10% pertahun. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Pakistan selama periode 2012-2017 surplus dengan pertumbuhan 15% per tahun.



Gambar 3. Neraca Perdagangan Indonesia – Pakistan, 2008-2017 (USD Juta)

Sumber: Trademap (2018), diolah

Pemanfaatan Tarif Preferensi IJEPA dan IPPTA untuk Ekspor Indonesia

Literatur yang mengukur tingkat pemanfaatan FTA di Indonesia masih terbatas terutama yang menghitung pemanfaatan kerja sama IPPTA. Sitepu & Nurhidayat (2015) telah membandingkan pemanfaatan FTA Indonesia untuk ASEAN FTA (AFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA); ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA

(AIFTA) dan IJEPA namun tidak menyertakan penelitiannya untuk IPPTA. Sitepu & Nurhidayat (2015) menemukan bahwa tingkat *coverage rate* dalam FTA Indonesia yang tinggi tidak diikuti oleh tingkat pemanfaatannya. Rata-rata *coverage rate* pada FTA yang dianalisis oleh Sitepu & Nurhidayat (2015) adalah di atas 90% namun rata-rata tingkat pemanfaatan FTAnyanya hanya 28%. Tingkat pemanfaatan paling tinggi

adalah pada ACFTA yaitu 35,98% diikuti oleh AKFTA 33,61%, IJEPA 32,65%, AFTA 30,43% dan yang paling rendah adalah AIFTA 6,05%.

Penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif tidak serta menjadi insentif bagi pengusaha untuk memanfaatkan tarif preferensi tersebut. Cheong (2014), Ing et.al (2016), Hayakawa et.al (2016), Takashi & Urata (2008 dan 2009), Zhang (2011) menemukan bahwa tingkat pemanfaatan FTA sangat ditentukan oleh karakteristik perusahaan. Hal ini terkait dengan biaya yang dikeluarkan dan tingkat kerumitan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal atau SKA (Wignaraja et.al, 2009; Itaravitak, 2011; Keck & Lendle, 2012; dan Hayakawa & Laksanapanyakul, 2017). Tingkat pemanfaatan FTA juga bervariasi untuk produk ekspor (Cheong, 2014; Hayakawa et.al, 2016). Tingkat pemanfaatan ekspor Indonesia dalam kerangka IJEPA dalam periode 2012-2016 cenderung stagnan. Pada tahun 2012 pemanfaatan IJEPA untuk ekspor ke Jepang sebesar 47,7%. Pada tahun 2013 tingkat pemanfaatannya naik menjadi 59,7% namun setelah itu secara bertahap kembali pada tingkat 47,2% pada tahun 2016. Secara rata-

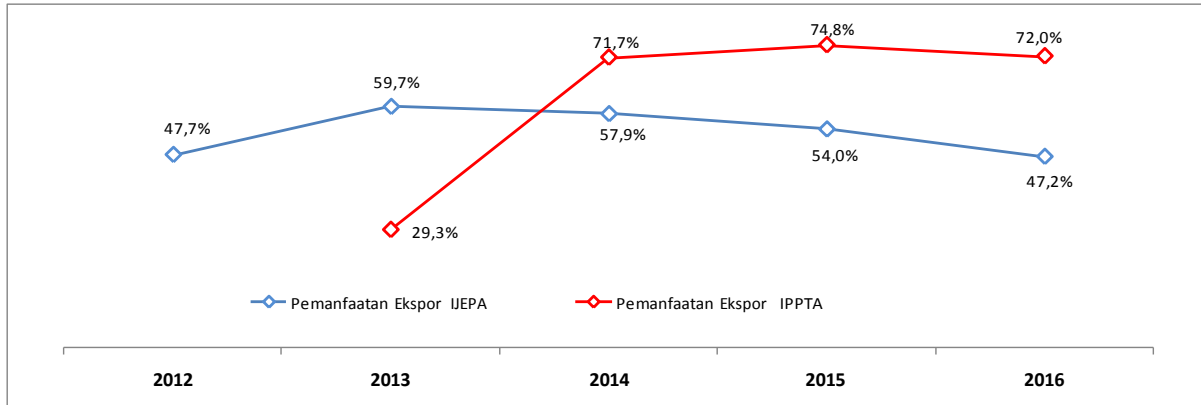
rata tingkat pemanfaatan ekspor dalam IJEPA turun sebesar 1,2% per tahun.

Rendahnya utilisasi FTA tidak hanya terjadi pada kasus IJEPA. Pada FTA yang lain seperti AFTA, ACFTA, dan AKFTA, tingkat pemanfaatan juga rendah. Menurut Sitepu & Nurhidayat (2015) beberapa penyebab yang mungkin menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan FTA tersebut karena perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara tarif MFN dan tarif preferensi; Prosedur yang harus dijalani untuk dapat menggunakan tarif preferensial dianggap cukup menyulitkan (*compliance cost* tinggi). Kesalahan identifikasi dalam sistem komputer pabean yang merekam data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam hal importasi menggunakan beberapa skema fasilitas.

Berbeda dengan IJEPA, tingkat pemanfaatan IPPTA selama 2013-2016 untuk ekspor Indonesia ke Pakistan mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu 31,6% per tahun. Pada tahun 2013 yaitu awal implementasi IPPTA, tingkat pemanfaatan untuk ekspor sebesar 29,3%. Angka tersebut terus meningkat pesat pada tahun 2013 menjadi 71,7%. Selanjutnya tingkat pemanfaatan IPPTA terus berada pada

level di atas 70%. Pemanfaatan IPPTA untuk ekspor ke Pakistan yang tinggi terutama digunakan untuk ekspor

produk *Crude Palm Oil* (CPO). Produk CPO mengalami peningkatan ekspor yang signifikan sejak IPPTA berlaku.



Gambar 4. Tingkat Pemanfaatan Tarif Preferensi untuk Ekspor Indonesia dalam Kerangka IJEPA dan IPPTA

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Tingginya tingkat pemanfaatan IPPTA di sisi ekspor Indonesia didorong oleh ekspor minyak sawit yang berhasil memanfaatkan tarif preferensi ke Pakistan. IPPTA telah meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dengan Pakistan dari surplus USD 1,2 miliar pada tahun 2013 menjadi surplus 2,2 miliar pada tahun 2017. Kebutuhan Pakistan akan minyak sawit Indonesia mendongkrak secara signifikan ekspor produk tersebut. Selain minyak sawit, beberapa produk ekspor utama Indonesia ke Pakistan mengalami kenaikan ekspor, antara lain buah pinang, batubara, kendaraan

penumpang, suku cadang kendaraan, dan serat stapel.

Pemanfaatan Preferensi IJEPA dan IPPTA untuk Ekspor Berdasarkan Produk

Menurut Cheong (2014) tingkat pemanfaatan FTA bervariasi antar sektor perdagangan. Hal ini didukung Hayakawa et.al (2016) yang menemukan bahwa biaya yang ditimbulkan untuk penerbitan SKA berbeda antar sektor industri sehingga skala perusahaan pada akhirnya menentukan apakah pengusaha akan memanfaatkan tarif preferensi atau tidak. Menurut Takashi & Urata (2008 dan 2009) tingkat

pemanfaatan tarif preferensi oleh perusahaan Jepang masih rendah dan perusahaan besar cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Rendahnya pemanfaatan tarif preferensi terjadi pada perusahaan Jepang yang berafiliasi di negara mitra karena perusahaan tersebut menggunakan insentif dari skema investasi.

Tabel 1 menggambarkan tingkat pemanfaatan IJEPA 20 sektor yang memiliki nilai penerbitan SKA paling tinggi. 20 sektor tersebut mewakili 56% dari total nilai ekspor yang tercantum dalam SKA. Rata-rata tarif yang berlaku dalam kerangka IJEPA sudah cukup rendah dan sudah 0%. Hanya *footwear* dan produk *coffee, tea, mate and spices* yang memiliki tarif masing-masing 2,78% dan 0,77%.

Tabel 1. Pemanfaatan Tarif Preferensi IJEPA Untuk Ekspor Berdasarkan Produk

HS 2 digit	Deskripsi	Nilai SKA 2016 (USD Juta)	Rata-rata Tarif IJEPA per2016	Pemanfaatan FTA 2012	Pemanfaatan FTA 2016	Keterangan
26	Ores, slag and ash	464,78	-	60	36	↓
44	Wood and articles of wood	375,62	-	46	50	↑
39	Plastics	372,45	0,00	88	91	↑
3	Fisheries	302,73	-	60	73	↑
64	Footwear	217,77	2,76	71	71	↔
62	Apparel not knited	209,89	-	70	61	↓
61	Apparel knited	186,79	-	76	61	↓
29	Organic chemicals	180,97	0,02	85	85	↔
15	Animal,vegetable fats and oil	176,61	-	91	95	↑
55	Manmade staple fibres	157,40	-	96	94	↓
52	Cotton	107,76	-	90	94	↑
94	Furniture	80,29	-	33	43	↑
28	Inorganic chemicals	76,27	-	89	93	↑
54	Manmade filaments	69,15	-	91	79	↓
9	Coffee, tea, mate and spices	63,09	0,77	47	55	↑
38	Miscellaneous chemical products	61,60	-	93	87	↓
63	Other made textile articles	58,28	-	93	88	↓
16	Meat, fish and seafood food preparations nes	58,23	-	48	48	↔
56	Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage	37,97	-	93	95	↑
14	Vegetable plaiting materials	35,51	-	99	100	↑

Sumber : Hasil kalkulasi penulis

Sektor yang paling tinggi nilai pengajuan ekspor dalam SKA adalah *Ores and, Slag and ash; Wood and article of woods*; dan *plastics*. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai pengajuan ekspor dalam SKA yang tinggi tidak harus diikuti oleh nilai pemanfaatan yang tinggi pula. Misalnya pada *Ores, slag and ash* pemanfaatannya hanya 36% walaupun nilai pengajuan SKA-nya merupakan yang paling tinggi. Sementara *vegetable plating materials* memiliki tingkat pemanfaatan IJEPA sebesar 100%.

Sebagian sektor perdagangan mengalami kenaikan tingkat pemanfaatan IJEPA seperti *wood, plastic, fisheries, animal and vegetable fats and oil*. Kenaikan tingkat pemanfaatan tarif preferensi adalah hal yang seharusnya, mengingat margin preferensi yang menurun tiap tahun (Keck & Lendle, 2012). Namun demikian beberapa sektor perdagangan mengalami penurunan tingkat pemanfaatan IJEPA seperti *Ores, slag and ash, apparel, manmade staple fibres, manmade filament, chemical product* dan *other made textile*. Menurut Keck & Lendle (2012) salah satu faktor perubahan tingkat pemanfaatan FTA adalah perubahan pada nilai

perdagangannya. Namun hipotesis itu tidak terjadi pada produk *ores slag and ash, apparel, dan man made textile*.

Tabel 2 menunjukkan produk ekspor Indonesia ke Pakistan yang menggunakan SKA untuk melakukan ekspornya. Dapat dilihat bahwa *Animal, vegetable fats and oil* memiliki nilai pemanfaatan IPPTA yang tertinggi sebesar USD 1,1 miliar dollar. Tingkat pemanfaatannya pun meningkat tajam dari hanya 38% pada tahun 2013 menjadi 89% pada tahun 2016. Peningkatan penggunaan IPPTA juga terjadi pada sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia ke Pakistan. Hanya beberapa produk saja yang tingkat pemanfaatan IPPTA-nya mengalami penurunan, seperti *Miscellaneous manufactured articles Tanning, dyeing extracts, dan Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes*.

Dalam kasus IPPTA cakupan produk Indonesia yang mendapat preferensi di Pakistan hanya 313 pos tarif namun produk tersebut merupakan ekspor unggulan Indonesia ke Pakistan. Pada tahun 2016 jumlah produk yang diajukan penerbitan SKA ke Pakistan sebanyak 193 produk. Pada Tabel 3, 20 produk dengan nilai pengajuan SKA

tertinggi telah mewakili 99% total nilai SKA IPPTA. SKA minyak sawit sendiri sudah mencakup 90% nilai total SKA.

Tabel 2 mengkonfirmasi pemanfaatan IPPTA didominasi oleh produk minyak sawit Indonesia ke Pakistan.

Tabel 2. Pemanfaatan Preferensi IP-PTA untuk Ekspor (Sektor), 2013-2016

HS 2 digit	Deskripsi	Nilai SKA 2016 (USD)	Pemanfaatan FTA 2013	Pemanfaatan FTA 2016	Keterangan
15	Animal,vegetable fats and oil	1.161,1	38	89	↑
48	Paper and paperboard	30,5	6	70	↑
8	Edible fruit, nuts	23,4	10	17	↑
40	Rubber and articles thereof	20,5	34	75	↑
18	Cocoa and cocoa preparations	12,4	14	95	↑
9	Coffee, tea, mate and spices	8,6	30	48	↑
38	Miscellaneous chemical products	8,1	35	62	↑
27	Mineral fuels, oil	5,0	33	24	↑
34	Soaps, lubricants, waxes, candle	3,2	5	16	↑
29	Organic chemicals	2,3	20	29	↑
33	Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries	1,8	1	32	↑
39	Plastics and articles thereof	1,6	52	72	↑
55	Manmade staple fibres	1,5	1	7	↑
23	Residues, wastes of food industry	1,4	10	15	↑
96	Miscellaneous manufactured articles	0,7	16	12	↓
32	Tanning, dyeing extracts	0,6	34	16	↓
69	Ceramic products	0,4	11	46	↑
21	Miscellaneous edible preparations	0,3	60	93	↑
13	Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes	0,3	32	30	↓
52	Cotton	0,2	-	54	↑

Sumber : Hasil Kalkulasi Penulis

Pertumbuhan Perusahaan Pengguna SKA

Secara nasional jumlah perusahaan yang menerbitkan SKA preferensi FTA di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 6.325 perusahaan dan meningkat di tahun 2016 sebanyak 7.208 perusahaan. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang menerbitkan

SKA dalam periode 2012-2016 adalah 3,3% per tahun. Jika dibandingkan tahun 2015, peningkatan jumlah perusahaan yang menggunakan SKA tahun 2016 meningkat 2,65%. Menurunnya pertumbuhan jumlah perusahaan yang menggunakan SKA preferensi menjadi indikasi dari jumlah pertumbuhan perusahaan eksportir

yang juga menurun atau pemanfaatan SKA oleh perusahaan sudah memasuki titik jenuhnya.

Perusahaan atau eksportir yang mengajukan penerbitan SKA untuk skema IJEPA sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan skema IPPTA. Hal tersebut dikarenakan cakupan produk dalam komitmen IJEPA jauh lebih luas dari pada IPPTA. Selain itu, IJEPA sudah cukup lama diimplementasikan sehingga eksportir sudah cukup paham dengan keberadaan IJEPA. Namun demikian pertumbuhan pengguna SKA IJEPA selama 2012-2016 relatif rendah yaitu 2,6% per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna skema IJEPA sudah pada level jenuh. Pertumbuhan jumlah perusahaan pengguna skema IPPTA masih tumbuh 18,2% per tahun.

Sebaran perusahaan pengguna SKA IJEPA terkonsentrasi pada wilayah

Jakarta sebanyak 614 perusahaan, Jawa Timur (398), Jawa Barat (392), Jawa Tengah (227), Bali (100), Jogjakarta (80) dan Sumatera Utara (78). Dengan demikian, pemanfaatan IJEPA masih didominasi perusahaan-perusahaan di pulau Jawa dengan hampir 80% dari total perusahaan yang mengajukan SKA IJEPA secara nasional. Sementara itu perusahaan yang mengajukan SKA IPPTA paling banyak di Jakarta sebanyak 78 perusahaan, Jawa Timur 61 perusahaan dan Sumatera Utara sebanyak 58 perusahaan. Jika dilihat dari nilai ekspor yang diajukan dalam SKA, daerah yang paling tinggi nilai ekspor menggunakan SKA IPPTA adalah Dumai (salah satu daerah di Sumatera) dengan jumlah perusahaan sebanyak 15 dan nilai ekspor USD 568 juta atau 39% dari total ekspor dengan SKA IPPTA.

Tabel 3. Pertumbuhan Perusahaan Pengguna SKA Periode 2012-2016

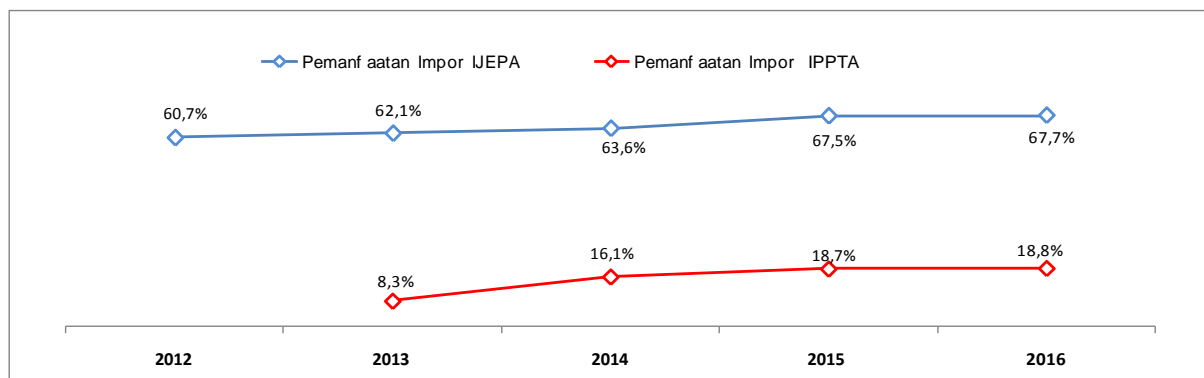
Tahun	Jumlah Perusahaan yang Menggunakan SKA Ekspor	
	IJEPA	IP PTA
2012	1.792	
2013	1.889	169
2014	1.97	283
2015	1.98	305
2016	1.986	288
Pertumbuhan 2012-2016 (%)	2,60%	18,20%

Sumber : Hasil Kalkulasi Penulis

Pemanfaatan Tarif Preferensi IJEPA dan IPPTA dalam Impor Indonesia

Pemanfaatan IPPTA di sisi impor masih rendah rata-rata 15% per tahun (2012-2016). Namun, pertumbuhan pemanfaatannya tumbuh rata-rata 30% per tahun dalam periode yang sama. Pada tahun 2013 pemanfaatan impor yang menggunakan skema IPPTA hanya sebesar 8,3%, terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 18,8%.

Sementara itu pemanfaatan impor dengan skema IJEPA di sisi impor selama periode 2012-2016 meningkat sekitar 3% dari angka 60,7% pada tahun 2012 menjadi 67,7% per tahun. Rata-rata pemanfaatan IJEPA untuk impor selama 2012-2016 adalah 64,3%. Dilihat dari nilai utilisasi impor yang cenderung naik, hal ini menunjukkan importir semakin memanfaatkan fasilitas perjanjian perdagangan.



Gambar 5. Nilai Utilisasi Impor Indonesia dalam IP-PTA dan IJEPA, 2012-2016 (%)

Sumber: Hasil kalkulasi penulis

Pemanfaatan Preferensi IJEPA dan IPPTA untuk Impor Berdasarkan Produk

Cakupan produk yang memperoleh preferensi IJEPA cukup luas yaitu mencapai 93% dari total pos tarif Indonesia. Tabel 4 memuat produk dalam HS 2 digit (*chapter*) yang memiliki nilai impor Indonesia dari Jepang yang

paling tinggi. Rata-rata tarif Indonesia untuk Jepang dalam kerangka IJEPA sudah relatif rendah bahkan 0% seperti *tanning, dyeing extract; manmade staple fibres; paper and paperboard; manmade filaments; soaps, lubricants, waxes, candles; miscellaneous article of base metal*. Produk yang lainnya juga memiliki rata-rata tarif yang hampir nol.

Tabel 4. Pemanfaatan Tarif Preferensi IJEPA dalam Impor Indonesia Berdasarkan Produk

HS 2 digit	Deskripsi	Rata-rata Tarif dalam Kerangka IJEPA	Nilai Impor Eligible Produk 2016 (USD Juta)	Pemanfaatan FTA 2012	Pemanfaatan FTA 2016	Keterangan
84	Machinery	0,1	2.558,0	74,9	76,3	↑
87	Vehicles other than railway	1,7	1.609,8	98,7	99,8	↑
85	Electrical, electronic equipment	0,2	882,1	50,6	57,7	↑
39	Plastics and articles thereof	1,7	639,4	92,0	90,0	↓
40	Rubber and articles thereof	0,2	438,2	100,0	100,0	↔
72	Iron and steel	9,5	414,2	22,7	28,7	↑
90	Optical, photo, technical, medical	0,1	323,9	87,8	87,2	↓
29	Organic chemicals	0,0	207,5	62,1	70,0	↑
73	Articles of iron or steel	7,6	195,8	28,9	32,4	↑
38	Miscellaneous chemical products	0,1	175,0	96,7	92,7	↔
32	Tanning, dyeing extracts	-	97,7	54,2	54,0	↓
55	Manmade staple fibres	-	91,9	65,5	74,0	↑
28	Inorganic chemicals	0,1	90,9	82,5	83,0	↑
48	Paper and paperboard	-	77,0	99,8	99,9	↑
68	Stone, plaster, cement, asbestos, mica	0,7	69,7	100,0	100,0	↔
81	Other base metals	0,7	63,3	92,8	97,0	↑
54	Manmade filaments	-	56,4	100,0	100,0	↔
76	Aluminium and articles thereof	0,2	56,2	88,8	87,3	↓
34	Soaps, lubricants, waxes, candles	-	56,1	74,3	74,5	↑
83	Miscellaneous articles of base metal	-	53,3	100,0	100,0	↔

Sumber: Hasil kalkulasi penulis

Berdasarkan kelompok produk HS 2 digit pemanfaatan IJEPA untuk beberapa produk cukup tinggi yaitu di atas 90% seperti *vehicle; plastic; rubber and article thereof; mescellaneous*

chemical product; paper; other base metal; manmade filaments; dan miscellaneous article of base of metal. Hampir semua produk juga mengalami peningkatan pemanfaatan IJEPA.

Tabel 5. Pemanfaatan Tarif Preferensi IPPTA dalam Impor Indonesia Berdasarkan Produk

HS 2 digit (Chapter)	Deskripsi	Rata-rata Tarif Indonesia untuk Pakistan	Nilai Impor Eligible Produk (USD Ribu)	Pemanfaatan IPPTA 2013	Pemanfaatan IPPTA 2016	Keterangan
40	Rubber and articles thereof	5,0	5.238,1	16,6	17,2	↑
73	Articles of iron or steel	3,6	4.618,1	80,5	60,4	↓
32	Tanning, dyeing extracts	-	3.504,4	65,6	70,2	↑
24	Tobacco and manufactured	9,5	2.231,4	14,6	100,0	↑
54	Manmade filaments	4,8	1.093,5	53,3	32,8	↓
33	Essential oils	5,0	969,3	7,1	10,8	↑
19	Cereal, flour, starch, milk preparation	3,1	776,5	43,3	31,5	↓
55	Manmade staple fibres	3,8	592,4	0,2	0,6	↑
84	Machinery, nuclear reactors, boilers, etc	1,3	462,6	2,1	4,9	↑
58	Special woven or tufted fabric	2,5	449,9	99,9	99,6	↓
52	Cotton	1,5	446,3	1,3	19,6	↑
96	Miscellaneous manufactured articles	9,0	113,3	0,1	0,8	↑
08	Edible fruit, nuts	-	1,9	0,03	0,00	↓
82	Tools, implements, cutlery	4,3	0,5	-	0,1	↑
61	Articles of apparel knit	7,0	0,4	6,0	0,1	↓
50	Silk	2,5	0,3	-	100,0	↑
42	Articles of leather	4,4	0,1	-	86,3	↑

Sumber : Hasil kalkulasi penulis

Jumlah produk impor Indonesia asal Pakistan yang diberikan tarif preferensi dalam kerangka IPPTA sebanyak 232 pos tarif. Produk tersebut tersebar dalam 31 *chapter* (HS 2 digit) namun yang memiliki nilai impor Indonesia dari Pakistan hanya sebanyak 17 *chapter*. Selama periode 2013-2016 impor Indonesia dari Pakistan tidak mengalami lonjakan yang berarti seperti yang terjadi pada sisi ekspor Indonesia ke Pakistan. Bahkan nilainya cenderung turun sebesar 1%.

Produk yang mengalami peningkatan impor diantaranya adalah *tanning*; *manmad filaments*; *manmade staple fibres*; *edible fruits*; *tools, implements, cutlery*; dan *article of apparel knitted*. Produk yang lainnya justru mengalami penurunan nilai impor dari Pakistan. Mencermati kinerja impor Indonesia dari Pakistan untuk produk *eligible* yang memperoleh preferensi terlihat bahwa dampak IPPTA lebih banyak mendorong ekspor Indonesia dibandingkan ekspor Pakistan.

Tingkat pemanfaatan IPPTA berdasarkan produk secara umum juga relatif rendah. Produk *rubber and article thereof* yang memiliki nilai impor paling tinggi hanya memiliki tingkat pemanfaatan IPPTA 17,2%. Tingkat pemanfaatan *edible fruits* dalam skala agregat HS 2 digit bahkan tingkat pemanfaatannya hampir 0%. Hal tersebut karena untuk produk buah impor Indonesia dari Pakistan lebih banyak untuk produk yang tidak mendapat preferensi seperti kurma, apricot dan pisang. Sementara produk buah dalam HS 08 yang memperoleh preferensi IPPTA hanya jeruk.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

IJEPA merupakan kerja sama perdagangan bebas yang sangat komprehensif dengan cakupan liberalisasi produk pada hampir semua pos tarif dibandingkan dengan IPPTA yang hanya meliberalisasi pos tarif tertentu yang menjadi prioritas dalam perdagangan bilateral Indonesia dan Pakistan. Melihat tingkat pemanfaatannya, Indonesia belum secara optimal memaksimalkan skema IJEPA dalam ekspornya. Terdapat gap yang negatif dari pemanfaatan ekspor terhadap impor dengan tren yang terus

meningkat. Hal ini akan berdampak pada neraca perdagangan bilateral di masa yang akan datang. Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan preferensi IJEPA untuk mendorong ekspor Indonesia ke Jepang dan memperbaiki neraca perdagangan.

Sementara itu, walaupun IPPTA merupakan kerja sama perdagangan bebas yang hanya dalam bentuk tarif preferensi untuk produk tertentu tetapi tingkat pemanfaatannya lebih tinggi di sisi Indonesia dibandingkan Pakistan. Dampak IPPTA telah mendongkrak neraca perdagangan Indonesia terhadap Pakistan. Jumlah perusahaan pengguna skema IPPTA juga masih meningkat signifikan.

Melihat hasil yang sangat berbeda dari pemanfaatan IJEPA dan IPPTA nampaknya kerja sama dalam bentuk *Preferential Trade Agreement* (PTA) lebih sesuai untuk Indonesia dibandingkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan yang komprehensif seperti IJEPA. Hal tersebut karena cakupan produk yang diliberalisasi dalam PTA dipilih sedemikian sehingga merupakan produk yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan perdagangan di

negara mitra FTA. Sementara itu IJEPA mencakup hampir seluruh produk yang diperdagangkan sehingga produk-produk yang tidak memiliki daya saing juga harus berkompetisi dengan produk yang berasal dari Jepang.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil studi adalah kerja sama perdagangan Indonesia dalam kerangka bilateral sebaiknya dilakukan dalam bentuk kerja sama preferensi pengurangan tarif atau *Preferential Trade Agreement* (PTA) untuk produk yang menjadi unggulan Indonesia. Kerja sama PTA terbukti dapat mendorong ekspor dan tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan FTA yang lebih komprehensif. Pembentukan kerja sama *Economic Partnership* seperti IJEPA perlu disertakan pula kerja sama yang menjamin peningkatan perdagangan dan pemanfaatan preferensi yang seimbang antara negara anggota. Pemerintah juga perlu mendorong para pelaku usaha dalam memanfaatkan FTA Indonesia yang sudah ada agar lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Pengkajian Kerja sama Perdagangan Internasional yang telah mengizinkan penulis untuk

menyusun kajian ini dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada tim Puska KPI: Deky Paryadi, dan Wibowo Kurniawan atas kontribusinya dalam penulisan kajian Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Risna Triandhari, SE, M.SE atas masukannya dalam penyusunan studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ando, M. Kimura, F. (2012). How Did the Japanese Exports Respond to Two Crises in the International Production Network?: The Global Financial Crisis and the East Japan Earthquake. *ASEAN Economic Journal*, Volume 26(3), Halaman 261-287
- Ardiyanti, S.T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia-Jepang (IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. *Buletin Ilmiah Litbang perdagangan*, Vol: 9(2), halaman 129-15
- Athukorala, P.C. & A. Kohpaiboon. (2011). 'Australia-Thailand Trade: Has the FTA Made a Difference?', *Australia National University Working Papers in Trade and Development No. 2011/12, Canberra: ANU*.
- Budiarti, F.T & Hastiadi, F.T. (2015). Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol: 15(2), Halaman 192-209
- Candau, O., Carrare, C., De Melo, J., & Tumurchudur, B. (2004). The Utilization Rate of Preferences in the

- EU. Paper presented at the 7th Global Economic Analysis Conference, Washington D.C., 17-19 June 2004.
- Cheong, I. (2014). Korea's Policy Pavlage for Enhancing its FTA Utilization and Implications for Korea's Policy. Eria Discussion Paper Series ERIA-DP-2014-11.
- Gocklas C.S, L. Sulasmiyati, Sri. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol: 5(5), halaman 191- 200
- Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., & Shiino, K. (2013a). Some Practical Guidance for the Computation of Free Trade Agreement Utilization Rates. IDE Discussion Paper No. 438.
- Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., & Shiino, K. (2013b). FTA Utilization: Certificate of Origin Data Versus Customs Data. Institute of Developing Economies (IDE) Discussion Paper No 428
- Hayakawa, K. (2014). Impact of diagonal cumulation rule on FTA utilization: Evidence from bilateral and multilateral FTAs between Japan and Thailand. *Journal of the Japanese and International Economies*, Volume 32, halaman 1-16.
- Hayakawa, K., Kim, Hansung., Lee, Hyun-Hoon. (2014). Determinants on Utilization of Korea-ASEAN Free Trade Agreement: Margin Effect, Scale Effect, and ROO effect. *World Trade Review*, Volume 13(3), halaman 499-515.
- Hayakawa, K., Laksanapanyakul, N., Urata, S. (2016). Measuring the Cost of FTA Utilization: Evidence from Transaction-Level Import Data of Thailand. *Review of World Economics*, Volume 152(3), Halaman 559-575.
- Hayakawa, K. Laksanapanyakul, N. (2017). Impacts of Common Rules of Origin on FTA Utilization. *International Economics and Economic Policy*, Volume 14(1), halaman 75-90.
- Inama, S. (2003). Trade Preferences and the World Trade Organization Negotiations on Market Access. *Journal of World Trade*, 37 (5), 959-979
- Ing, Lili Yan., Urata, S., Fukunaga, Y. (2016). How Do Exports and Imports Affect the Use of Free Trade Agreements? Firm-level Survey Evidence from Southeast Asia, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2016-01.
- Itaravitak, C., Mudkum, C., Panpheng, K. (2011). Rules of Origin and Utilization of Free Trade Agreements: An Econometric Analysis. *TDR Quarterly Review*
- Kawai, M. & G. Wignaraja. (2011). Asia's Free Trade Agreements: How is Business Responding? Cheltenham (UK): Edward Elgar.
- Kawai, M., Wignaraja, G. (2013). Patterns of Free Trade Areas in Asia. East West Center, Honolulu (Hawaii)
- Keck, Alexander & Lendle, Andreas. (2012). "New evidence on preference utilization," WTO Staff Working Papers ERSD-2012-12, World Trade Organization (WTO), Economic Research and Statistics Division.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018). Joint Press Statement on the Occasion of the entry into force of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership. Dipetik Juni 2018 dari MOFA: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0807.html>
- PBC. (2015). An Analysis Of The Pakistan-Indonesia Pta & A Framework For Negotiating The Pakistan-Indonesia FTA.
- Okabe, Misa. (2015). 'Impact of Free Trade Agreements on Trade in East Asia',

- ERIA Discussion paper Series, ERIA-DP-2015-01
- Ratananarumitsorn, T., T. Piyanirun, & Laksanapanyakul. (2008). "Utilization of Free Trade Agreement Preferences: The Case of Thai Agricultural Export", *TDR Quarterly Review* (September), pp. 11-18
- Setiawan, S. (2012). Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol: 17(2).
- Sitepu, E.M.P., Nurhidayat, R. (2015). Mengukur Tingkat Pemanfaatan FTA yang telah dilakukan Indonesia: Studi Kasus dengan Menggunakan FTA Preferences Indicator. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 19, No.3 halaman 284-298.
- Takahashi, K., & Urata, S. (2008). On the use of FTAs by Japanese firms (Discussion Paper No. 08-E-002). Tokyo: Research Institute of Economy, Trade, and Industry.
- Takahashi, K., & Urata, S. (2009). On the use of FTAs by Japanese firms: Further Evidence. Discussion Paper Series No. 09-E-028. Tokyo: Research Institute of Economy, Trade, and Industry.
- Wignaraja, G. Lazaro, D. De Guzman, Genevieve. (2009). Factors Affecting Use or Nonuse of Free Trade Agreements in the Philippines. *Philippines Journal of Development*, Vol: 36(2), halaman 69-95.

